

Matrik Pemantauan Capaian Kinerja Berdasarkan PK Badan Ketahanan Pangan Triwulan II Tahun 2016

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		REALISASI TRIWULAN					KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			I	II	III	IV					
A	Skor PPH Ketersediaan	89,71	%								
1	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan)	103	Kawasan	190	80			77,67%		(1) kurangnya pendampingan terhadap penyelesaian administrasi keuangan; (2) perubahan pegawai pengelola desa/kawasan Desa Mapan; (3) Lokasi yang jauh sehingga pelaksanaan administrasi keuangan mjd terlambat; (4) Penundaan kegiatan karena ada pemotongan DIPA kedua. (5) ada tiga kawasan yg blm dapat dilaksanakan yaitu kab. Serang, Pasaman Barat dan bandung krn penetapan sasaran baru pd pertengahan tahun;	Mengoptimalkan Tim Pendampingan dan Percepatan Kegiatan dan Anggaran BKP
2	Jumlah Lokasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Lokasi)	35	Lokasi	35	35			100%		(1) Penundaan kegiatan lanjutan untuk SKPG karena ada wacana pemotongan, (2) Pergantian aparat pelaksana SKPG menyebabkan pelaksanaan pengolahan data/ analisis SKPG terhambat pelaksanaannya	pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
3	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan)	303	Gapoktan	25	193			63,70%		(1) Keterbatasan SDM yang menangani LDPM sehingga proses kegiatan berjalan lambat, SDM LDPM juga merangkap penanggung jawab PUPM/TTI, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
4	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (Unit)	54	Lumbung	0	22			40,74%	Dalam proses kontrak	(1) Surat hibah belum ada dari Pemda ke Kelompok, (2) Penundaan kegiatan karena ada pemotongan DIPA kedua	Penjelasan proses hibah
5	Jumlah KK Pemberdayaan petani kecil dan gender (KK)	33,600	KK	0	5.040			15%	Pemberian bansos baru berjalan, krn hrs memalui penilaian setelah 6 bln, realisasi 15% dimanfaatkan utk pemberian dana bansos	Beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan di awal tahun harus tertunda krn adanya pemblokiran	Percepatan pencairan dana Matching Fund kepada kelompok
6	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran (KK)	26,880	KK	0	1.210			4,50%	Realisasi anggaran diberikan utk kegiatan Revolving Fund (dana bergulir), pembelian alat pertanian tan. Pangan, perkebunan, bibit dan pengolahan pasca panen di tiap-tiap kelompok	Proses pengadaan diatur secara terpisah agar penarikan dana tdk melalui batas yg telah ditentukan serta proses pengadaan yang memakan wktu disebabkan panitia pengadaan di kab terdiri dari lintas dinas-dinas dan desa yg bgtu banyak juga jarak yg berjauhan shg mengakibatkan biaya jd mahal	Percepatan pencairan dana Matching Fund kepada kelompok
B	Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%thn)	1	%								
1	JumlahKawasan Mandiri Pangan (Kawasan)	103	Kawasan	190	80			77,67%		(1) kurangnya pendampingan terhadap penyelesaian administrasi keuangan; (2) perubahan pegawai pengelola desa/kawasan Desa Mapan; (3) Lokasi yang jauh sehingga pelaksanaan administrasi keuangan mjd terlambat; (4) Penundaan kegiatan karena ada pemotongan DIPA kedua. (5) ada tiga kawasan yg blm dapat dilaksanakan yaitu kab. Serang, Pasaman Barat dan bandung krn penetapan sasaran baru pd pertengahan tahun;	Mengoptimalkan Tim Pendampingan dan Percepatan Kegiatan dan Anggaran BKP

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		REALISASI TRIWULAN					KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			I	II	III	IV					
2	Jumlah Lokasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Lokasi)	35	Lokasi	35	35			100%		(1) Penundaan kegiatan lanjutan untuk SKPG karena ada wacana pemotongan, (2) Pergantian aparat pelaksana SKPG menyebabkan pelaksanaan pengolahan data/ analisis SKPG terhambat pelaksanaannya	
3	Jumlah KK Pemberdayaan petani kecil dan gender (KK)	33,600	KK	0	5.040			15%	Pemberian bansos baru berjalan, krn hrs memalui penilaian setelah 6 bln, realisasi 15% dimanfaatkan utk pemberian dana bansos	Beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan di awal tahun harus tertunda krn adanya pemblokiran	Percepatan pencairan dana <i>Matching Fund</i> kepada kelompok
4	Jumlah KK yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran (KK)	26,880	KK	0	1.210			4,50%	Realisasi anggaran diberikan utk kegiatan <i>Revolving Fund</i> (dana bergulir), pembelian alat pertanian tan. Pangan, perkebunan, bibit dan pengolahan pasca panen di tiap-tiap kelompok	Proses pengadaan diatur secara terpisah agar penarikan dana tdk melalui batas yg telah ditentukan serta proses pengadaan yang memakan wktu disebabkan panitia pengadaan di kab terdiri dari lintas dinas-dinas dan desa yg bgtu banyak juga jarak yg berjauhan shg mengakibatkan biaya jd mahal	Percepatan pencairan dana <i>Matching Fund</i> kepada kelompok
5	Jumlah desa yang mengembangkan rantai nilai tanaman perkebunan (Desa)	224	Desa	0	0			0		(1) Pengadaan alat msh dlm proses identifikasi dan sebagian kontrak blm dilakukan, (2) Penundaan kegiatan karena ada pemotongan DIPA kedua	Untuk pencairan akan diatur jadwalnya oleh pusat, pengawalan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
C	Harga Gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥	HPP	Rp. 4.548/Kg atau 22,92 % diatas HPP	Rp. 4.090/Kg atau 10,54 % diatas HPP			100,00%	a. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani diambil dari data panel harga pangan di 22 provinsi sentra produksi padi b. Rata-rata harga GKP tingkat petani pada TW II (April-Juni) sebesar Rp. 4.090/kg atau 10,54 % diatas HPP (Rp 3.700). Rincian harga GKP pada April Rp. 4.072/Kg, Mei 4.092/Kg, dan Juni Rp. 4.106/Kg c. Kisaran harga GKP tingkat petani April-Juni sebesar Rp. 3.550 - Rp. 4.982/kg, dengan harga tertinggi di Provinsi Kalteng (34,65 % diatas HPP) dan terendah di Sumsel (4,05 dibawah HPP)	a. Masih adanya kejadian harga GKP ditingkat petani yang dibawah HPP (Rp. 3.700/kg), yaitu di Banten (April Rp. 3.681/kg dan Mei 3.680/Kg), Bengkulu (Mei Rp. 3.687/Kg), Jawa Tengah (April Rp. 3.572/Kg), Lampung (April Rp. 3.520/Kg, Mei 3.526/Kg, Juni Rp. 3.696/Kg), NTB (April Rp. 3.521/Kg dan Mei Rp. 3.654/Kg), Sumsel (April Rp. 3.483/Kg, Mei Rp. 3.515/Kg dan Juni Rp. 3.653/Kg) dan DIY (April Rp. 3.521/Kg dan Mei Rp. 3.530/Kg). b. Terjadi disparitas harga gabah yang cukup besar antar wilayah dan antar waktu yang membuat nilai koefisien variasi (CV) pada minggu atau bulan tertentu menjadi lebih besar dari 10%, sedang CV antar waktu relatif rendah/stabil (<5%), kecuali di Provinsi Sulteng 7,91%; c. Masih ada kab/prov mengirimkan data perkembangan harga gabah secara rutin (mingguan) ke Pusat	a. Memberikan sosialisasi dan informasi mengenai adanya penetapan HPP gabah/beras ke Petani b. Meningkatkan informasi harga gabah di bawah HPP ke Perum Bulok untuk dilakukan penyerapan gabah/beras c. Meningkatkan arus pelaporan data harga gabah dari daerah (kab/prov) ke tingkat pusat

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET		REALISASI TRIWULAN					KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				I	II	III	IV	KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)			
									d. Harga GKP Triwulan II lebih rendah dari Triwulan I karena panen raya		
1	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan)	303	Gapoktan	25	193			63,70%		(1) Keterbatasan SDM yang menangani LDPM sehingga proses kegiatan berjalan lambat, SDM LDPM juga merangkap penanggung jawab PUPM/TTI, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (Unit)	54	Lumbung	0	22			40,74%	Dalam proses kontrak	(1) Surat hibah belum ada dari Pemda ke Kelompok, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Penjelasan proses hibah, pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
	Jumlah Usaha Pangan Masyarakat (UPM)/TTI (Gap/TTI)	497/1.086	Gap/TTI	287	473/874			95.17% / 80.48%	(1) Prov. Kep. Riau mengembalikan dananya krn Gapoktannya tdk memenuhi persyaratan; (2) Lokasi TTI bertambah 92 TTI yaitu Prov Jabar 52, Jateng 23, DIY 13, dan Kalsel 4	(1) Kesulitan mendapatkan gapoktan padi, SPM sdh diajukan tetapi kontrak kerjasama belum ditandatangani, ada gapoktan yang tdk mempunyai NPWP, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mencari gapoktan padi, menandatangani kontrak kerjasama dan gapoktan segera membuat NPWP, pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
2	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (HBKN)	35	Lap	0	0			0	Kegiatan blm dilakukan	(1) Baru dilaporkan akhir tahun, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
D	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	< 10%		CV=2,64%	CV=0,41%			100%	a. Berdasarkan data panel harga pangan BKP, sampai dengan Triwulan II bulan April sampai dengan Juni 2016, koefisien variasi harga beras medium ditingkat konsumen (eceran) sebesar 0,412% yang menunjukkan harga sangat stabil, bahkan jauh lebih stabil dibandingkan dengan Triwulan I. b. Harga beras rata-rata bln April-Juni Rp. 11.018/Kg sedikit lebih rendah dari rata-rata Triwulan I Rp. 11.189/Kg, harga tertinggi Rp. 11.068/Kg dan terendah Rp. 10.979/Kg.	a. Secara nasional koefisien variasi (CV) harga beras antar waktu (April-Juni) sangat stabil, namun apabila dilihat antar wilayah (provinsi), CV cukup berfluktuasi (>10%), yaitu April 12,05%, Mei 12,76%, dan Juni 12,40%; b. Terjadi disparitas harga beras yang cukup besar antar wilayah/provinsi. Harga tertinggi Rp. 13.739/Kg di Prov. Kalteng, dan terendah Rp. 8.833/Kg di Prov. NTB.	a. Meningkatkan informasi harga beras b. Meningkatkan kelancaran arus distribusi beras antar wilayah (produsen ke konsumen) terkait dengan stabilitas harga beras tingkat konsumen. c. Meningkatkan kelancaran arus distribusi beras antar wilayah terkait dengan stabilitas harga beras tingkat konsumen

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET		REALISASI TRIWULAN					KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				I	II	III	IV	KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)			
	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (HBKN)			CV = 0,32%	CV = 0,39%				a. Berdasarkan data BPS, CV harga beras medium tingkat eceran sebesar 0.39%, yang menunjukkan harga sangat stabil; b. Rincian nilai CV beras cenderung terus naik dari tahun ke tahun.	a. Meskipun harga stabil, namun stabil pada harga yang sangat tinggi. Harga beras medium pada bulan April-Juni 2016 rata-rata Rp. 13.092/Kg, dengan rincian bulanan masing-masing Rp. 13.127/Kg, Rp. 13.034/Kg, dan Rp. 13.110/Kg. b. Harga beras cenderung terus naik dari tahun ke tahun.	Memantapkan stabilitas pasokan beras ke tingkat pedagang agar harga tetap stabil
1	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan)	303	Gapoktan	25	193			63,70%	Tahap persiapan administrasi dan verifikasi	(1) Keterbatasan SDM yang menangani LDPM sehingga proses kegiatan berjalan lambat, SDM LDPM juga merangkap penanggung jawab PUPM/TTI, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
2	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (Unit)	54	Lumbung	0	22			40,74%	Dalam proses kontrak	(1) Surat hibah belum ada dari Pemda ke Kelompok, (2) Penundaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Penjelasan proses hibah, pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran
3	Jumlah Usaha Pangan Masyarakat (UPM)/TTI (Gap/TTI)	497/1.086	Gap/TTI	287	473/874			95.17% / 80.48%	(1) Prov. Kep. Riau mengembalikan dananya krn Gapoktannya tdk memenuhi persyaratan; (2) Lokasi TTI bertambah 92 TTI yaitu Prov Jabar 52, Jateng 23, DIY 13, dan Kalsel 4	Kesulitan mendapatkan gapoktan padi, SPM sdh diajukan tetapi kontrak kerjasama belum ditandatangani, ada gapoktan yang tdk mempunyai NPWP	Mencari gapoktan padi, menandatangani kontrak kerjasama dan gapoktan segera membuat NPWP
4	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (HBKN)	35	Lap	0	0			38,40%	Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Rakor dalam menghadapi HBKN, Laporan keseluruhan kegiatan baru dilaporkan akhir tahun. Sedangkan laporan hasil rakor dalam rangka HBKN secara rutin dilaporkan kepada pimpinan		
E	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/hr)	2,040	Kkal/Kap/hr								
1	Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan (Desa)	4,894	Desa	0	3.500			72%		(1) Sebaaian KWT Masih dalam tahap Pencairan, namun penetapan lokasi sudah terkasana, (2) Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengoptimalkan Tim Pendampingan dan Percepatan Kegiatan dan Anggaran BKP
2	Jumlah Pemantauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	5	10			29%	Kegiatan pemantauan sudah dilaksanakan, namun laporan secara kesluruhan baru terlaksana pada akhir tahun	(1) Ada persyaratan bahwa kelompok harus berbadan hukum sehingga menghambat proses pencairan, (2) Laporan keseluruhan kegiatan baru dilaporkan akhir tahun. Sedangkan laporan hasil pemantauan secara rutin dilaporkan kepada pimpinan, (3) Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	kelompok mengajukan permohonan agar bisa secepatnya berbadan hukum kepada notaris

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		REALISASI TRIWULAN					KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			I	II	III	IV					
3 Jumlah Lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	1	1			3%	Penetapan lokasi sudah ada yaitu Banten	Masih dalam proses pencairan dana. Ada penunndaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, termasuk pendampingan pencairan anggaran	

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET		REALISASI TRIWULAN					KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				I	II	III	IV					
F	Konsumsi Protein (Gram/Kap/hr)	56,40	gram/kap/hr									
1	Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan (Desa)	4,894	Desa	0	3.500			72%		(1) Sebaaian KWT Masih dalam tahap Pencairan, namun penetapan lokasi sudah terkasana, (2) Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengoptimalkan Tim Pendampingan dan Percepatan Kegiatan dan Anggaran BKP	
2	Jumlah Pemantauan Penganekearagaman Konsumsi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	5	10			29%	Kegiatan pemantauan sudah dilaksanakan Prov. Babel, Sulsel, NTB, Sumut dan Jakarta, namun laporan secara kesiuruhan baru terlaksana pada akhir tahun	(1) Ada persyaratan bahwa kelompok harus berbadan hukum sehingga menghambat proses pencairan, (2) Laporan keseluruhan kegiatan baru dilaporkan akhir tahun. Sedangkan laporan hasil pemantauan secara rutin dilaporkan kepada pimpinan, (3) Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	kelompok mengajukan permohonan agar bisa secepatnya berbadan hukum kepada notaris	
3	Jumlah Lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	1	1			3%	Penetapan lokasi sudah ada yaitu Banten	Masih dalam proses pencairan dana, Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengawal dan memantau proses pencairan	
G	Skor PPH Konsumsi	86,2										
1	Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan (Desa)	4,894	Desa	0	3.500			72%		(1) Sebaaian KWT Masih dalam tahap Pencairan, namun penetapan lokasi sudah terkasana, (2) Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengoptimalkan Tim Pendampingan dan Percepatan Kegiatan dan Anggaran BKP	
2	Jumlah Pemantauan Penganekearagaman Konsumsi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	5	10			29%	Kegiatan pemantauan sudah dilaksanakan Prov. Babel, Sulsel, NTB, Sumut dan Jakarta, namun laporan secara kesiuruhan baru terlaksana pada akhir tahun	(1) Ada persyaratan bahwa kelompok harus berbadan hukum sehingga menghambat proses pencairan, (2) Laporan keseluruhan kegiatan baru dilaporkan akhir tahun. Sedangkan laporan hasil pemantauan secara rutin dilaporkan kepada pimpinan, (3) Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	kelompok mengajukan permohonan agar bisa secepatnya berbadan hukum kepada notaris	
3	Jumlah Lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	1	1			3%	Penetapan lokasi sudah ada yaitu Banten	Masih dalam proses pencairan dana, Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengawal dan memantau proses pencairan	
4	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal (Unit)	29	Unit	0	0			0%	Kegiatan blm berjalan	Masih dalam proses pencairan dana, Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengawal dan memantau proses pencairan	
5	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (Rekomendasi)	35	Lap	0	0			0%	Belum ada daerah yang mengirimkan lap uji lab TA. 2016	Laporan TW. 1 baru akan dilaporkan pada TW.2 menunggu hasil dari laboratorium		
H	Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (%)	10	%	0	0				Masih melaksanakan komisi teknis sertifikasi produk target TA. 2015			

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET		REALISASI TRIWULAN					KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KET	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			I	II	III	IV					
1	Jumlah Lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	1	1			3%	Penetapan lokasi sudah ada yaitu Banten	Masih dalam proses pencairan dana, Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengawal dan memantau proses pencairan
2	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan (Rekomendasi)	86	Lokasi	0	0			0%	Belum ada daerah yang mengirimkan lap uji lab TA. 2016	Laporan TW. 1 baru akan dilaporkan pada TW.2 menunggu hasil dari laboratorium	
1	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%)	≥	80%	0	0			0%	Kegiatan blm berjalan	Masih dalam proses pencairan dana, Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	
1	Jumlah Lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	1	1			3%	Penetapan lokasi sudah ada yaitu Banten	Masih dalam proses pencairan dana, Ada penunddaan kegiatan karena ada wacana pemotongan DIPA ke 2	Mengawal dan memantau proses pencairan
2	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan (Rekomendasi)	86	Lokasi	0	0			0%	Belum ada daerah yang mengirimkan lap uji lab TA. 2016	Laporan TW. 1 baru akan dilaporkan pada TW.2 menunggu hasil dari laboratorium	